

Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru

Fahru Riza¹ Hasim As'ari²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
Email: fahru.riza5502@student.unri.ac.id¹ hasimasari@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Program Kartu Prakerja merupakan Program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini dibuat oleh pemerintah Pusat dan berlaku pada seluruh daerah yang ada di Indonesia salah satunya Kota Pekanbaru. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru, seperti kurangnya minat peserta mengikuti pelatihan sehingga tidak meningkatkan kompetensi, sasaran program yang masih belum sesuai dan proses pendaftaran kartu Prakerja membuat sebagian masyarakat kebingungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam mensukseskan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan melalui penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini mengacu pada teori Evaluasi Reidar dale. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi terhadap objek penelitian dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru masih terdapat kendala. Faktor kendala dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru ialah pengelolaan sistem yang belum optimal yang dilakukan Pemerintah Pusat serta minimnya kalaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Evaluasi, Program Kartu Prakerja, Kota Pekanbaru



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah menjadi kota ke empat dengan penduduk terbanyak di Pulau Sumatera setelah Kota Medan, Palembang dan Bandar Lampung. Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru terus mengalami pertumbuhan yang menandakan bahwa perekonomian di daerah Kota Pekanbaru cukup baik sehingga menimbulkan daya tarik masyarakat luar untuk datang (migrasi) ke Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 km² dan jumlah penduduk mencapai 903,944 jiwa tentunya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang berada di Provinsi Riau. Jumlah penduduk yang semakin tinggi secara tidak langsung berpengaruh pada tingginya para pencari kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun hingga 64 tahun. Oleh karenanya, setiap orang yang mampu bekerja bisa disebut sebagai tenaga kerja. Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang

berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed), yaitu: (1). Tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas; (2). Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu; (3). Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (un-employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu. Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai potential labor force atau penduduk yang tidak bersedia bekerja meskipun mereka mampu dan ada permintaan kerja.. Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan.

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Tenaga kerja juga berarti tenaga kerja manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi, yang disebut juga sebagai sumber daya manusia. Tenaga kerja inilah yang menggarap sumber daya produksi alam. Manusia tidak hanya menggunakan tenaga jasmani, melainkan juga tenaga rohani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Sedangkan tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan kegiatan proses produksi. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 pasal 4 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Upaya memajukan kesejahteraan umum tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), salah satunya melakukan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional karena tenaga kerja merupakan subyek dan obyek pembangunan, dengan demikian, tenaga kerja menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dianggap berhasil jika masyarakat (tenaga kerja) dapat hidup dengan sejahtera. Menurut Badan Pusat Statistik Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran terbuka yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) ke-lompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari data yang di dapat di ketahui setiap tahun nya pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru mengalami penurunan. Di tahun 2020 tingkat pengangguran ter-buka di Kota Pekanbaru 8,56% di karena kan adanya pandemi Covid-19 sehingga perusahaan yang terkena dampak Covid-19 melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan dikarenakan masih banyak-nya perusahaan yang terkena dampak Covid-19 sehingga penurunan terhadap pengangguran hanya 0,27% dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 1,89% dikarenakan pandemi Covid-19 perlahan mulai membaik, perusahaan yang awal nya terkena dampak kini mulai membuka lowongan pekerjaan. Ketatnya persaingan dunia kerja menuntut setiap generasi muda milenial untuk dapat meningkatkan keterampilan kerja. Untuk bersaing dalam pasar kerja di Indo-nesia, penting bagi individu untuk terus meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka, mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian, dan ter-libat dalam jejaring profesional. Dengan bertambahnya tingkat pengangguran di Indonesia dan meningkatnya persaingan kerja, Presiden Joko Widodo menerbitkan salah satu Program, yaitu Program Kartu Prakerja yang merupakan stimulus sejak kampanye 2019 dan di-luncurkan pada tahun 2020. Program ini tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 76 Tahun 2020 tentang pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dan di ubah menjadi Peraturan Presiden (PERPRES) No. 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 36 Ta-hun 2020 Tentang pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun untuk 2 juta peserta. Februari 2020, Pemerintah mengesahkan Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui program Kartu Prakerja dan berlanjut hingga saat ini. Berikut rincian anggarannya dari tahun ke tahun: Tahun 2020 anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebesar 10 Triliun tar-get penerimanya sebesar 2juta orang, tahun 2021 anggaran yang di keluarkan pemerintah sebesar 21,2 Triliun target penerimanya sebesar 5,92juta orang, tahun 2022 anggaran yang di keluarkan pemerintah sebesar 18 Triliun target penerimanya sebesar 4,98juta orang. Berdasarkan Peraturan presiden No 36 Tahun 2020 Program Kartu Prakerja Pertama kali diluncurkan pada April 2020. Pada masa pandemi Covid-19, Program Kartu Prakerja menghadirkan pelatihan daring dan menggunakan Skema Semi Bansos dengan tujuan memberikan manfaat ganda dalam meningkatkan kompetensi serta menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi dan pada Tahun 2023 Pemerintah melanjutkan program di tahun ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, Rapat Komite Cipta Kerja telah memutuskan bahwa mulai tahun 2023 akan dijalankan Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian dengan porsi biaya pelatihan yang lebih tinggi daripada insentif.

Berdasarkan data yang di dapat program kartu prakerja di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 pencabutan kepesertaan Program Kartu Prakerja total 284 yang terdiri dari se-dang melaksanakan pendidikan formal sebanyak 135 orang, penerima bantuan lain sebanyak 57 orang, dan yang sedang bekerja sebanyak 92 orang. Pada tahun 2021 terdapat kenaikan pada pencabutan kepesertaan program Kartu Prakerja total 610 yang di antaranya sedang melakukan pendidikan formal sebanyak 275 orang, pen-erima bantuan lain 115 orang dan sedang bekerja sebanyak 220 orang. Pada tahun 2022 terdapat penurun pencabutan kepesertaan dari tahun sebelumnya yang dian-tarannya sedang melakukan pendidikan formal sebanyak 154 orang, penerima bantu-an lain sebanyak 83 orang dan sedang bekerja sebanyak 168 orang. Pada tahun 2022 tercatat 1.299 penerima program kartu prakerja di cabut kepesertaannya. Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau sebagai stakeholder pelaksanaan Pro-gram Kartu Prakerja menyatakan beberapa penerima manfaat program kartu

prakerja tersebut dicabut kepesertaannya karena tidak sesuai dengan kriteria/ persyaratan program kartu prakerja. Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang “Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru”

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif, alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif yaitu karena pendekatan fenomenologi dapat membantu peneliti memahami makna subjektif dari pengalaman yang dialami oleh partisipan penelitian. Pendekatan ini memfokuskan pada pengalaman yang dialami oleh partisipan, sehingga dapat membantu peneliti memahami bagaimana partisipan mempersepsikan, memaknai, dan merespons suatu fenomena. Pendekatan fenomenologi juga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang detail yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan melakukan analisis yang diteliti terhadap data yang dihasilkan, peneliti dapat menggambarkan fenomena secara detail dan menarik kesimpulan yang akurat tentang fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dengan fenomenologi yang bersifat deskriptif juga dapat menjaga fleksibilitas dalam penelitian. Peneliti dapat menyesuaikan proses penelitian dengan kondisi lapangan dan partisipan, serta memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, serta memperoleh gambaran yang detail dan akurat tentang pengalaman subjektif partisipan. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dan merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program kartu prakerja dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai Stakeholder pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Maka dari itu peneliti ingin melihat Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber data dari Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Adapun Informan Tersebut adalah:

1. Pendamping program kartu prakerja: kepala bidang Pemagangan Dan Produktivitas tenaga kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Riau.
2. Masyarakat penerima program partu prakerja.
3. Masyarakat bukan penerima Program Kartu Prakerja.

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan ini meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan menguasai informasi utama yang dibutuhkan untuk penelitian
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memeberikan informasi walupun tidak langsung dalam intraksi sosial yang sedang diteliti.

Maka dari itu peneliti menggunakan teknik Purposive sampling kerana Peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan di teliti oleh peneliti.

Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Evaluasi program kartu prakerja di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan penelitian adalah orang yang dianggap mengetahui tentang kondisi dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Program Kartu Prakerja Di Kota Pekanbaru. Data merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian yakni berupa suatu fakta yang ada agar memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya.

1. Data Primer. Data primer adalah Data utama yang di peroleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari para informan dan responden yang memiliki kompetensi dan pengetahuan untuk memberikan informasi yang di butuhkan dalam penelitian yang berkenaan dengan Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja tersebut. Selain itu, data juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap masyarakat yang menerima manfaat tersebut.
2. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari studi pustaka atau bahan informasi lain yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti, seperti catatan-catatan, buku-buku literature, dokumen, laporan dan sumber- sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, yang mana penelitian ini dilakukan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Penelitian ini dilakukan secara langung untuk dapat mengetahui secara langsung fakta-fakta tentang pelaksanaan program kartu Prakerja di kota pekanbaru.
2. Wawancara. Suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Herdiansyah (2011: 121), dalam metode wawancara ada tiga bentuk yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur dimana sebelumnya peneliti menyiapkan pertanyaan secara cermat dan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Sehingga pada saat penelitian berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau peneliti dapat melakukannya secara sistematis dan memahami fenomena yang terjadi.
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang di laporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Data yang diperoleh mulai dari peneliti melakukan proses observasi dan wawancara dan survei bertujuan untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dokumen dalam hal ini berupa file hasil penelitian, foto, dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dimulai dengan mengumpulkan data observasi dan wawancara. Data yang diperoleh tersebutlah yang menjadi bahan untuk peneliti dapat mengolah dan menganalisis. Sebelum mengolah data peneliti membaca dan memahami semua data yang telah diperoleh. Hasil dari data di susun berdasarkan pedoman penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan menyederhanakan data dan mengelompokkan kedalam konsep-konsep kunci pengklasifikasian data tersebutlah yang akan diolah peneliti. Klasifikasi data dilakukan secara manual oleh peneliti, berdasarkan klasifikasi tersebut kemudian disimpulkan berdasarkan data yang telah dikategorikan tersebut. Pendekatan bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Data yang telah berhasil diperoleh selanjutnya akan disusun secara terstruktur agar peneliti dapat melakukan analisis deskriptif. Miles dan Huberman dalam (Rijali, 2018) menyebutkan bahwasanya analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo. Reduksi data/proses transformasi data akan terus berlanjut sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Penyajian Data Penyajian data dijelaskan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh dalam menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian data tersebut. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan peninjauan ulang pada catatan-catatan hasil penelitian lapangan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang menggiring pada pengambilan keputusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru

Hasil Penelitian mengenai Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru merupakan hasil dari data dan fakta yang diperoleh langsung di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan, yaitu Relevansi, Efektivitas, Dampak, Efisiensi, Keberlanjutan dan Replikabilitas. Relevansi dalam penelitian ini adalah harus relevan dengan tujuan utama program tersebut, seperti meningkatkan ket-erampilan kerja dan peluang kerja bagi peserta serta mempertimbangkan relevansi dengan kebutuhan nyata peserta, termasuk kecocokan materi pelatihan dengan bi-dang pekerjaan yang diminati peserta. Selanjutnya Efektivitas dalam penelitian merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, efektivitas program adalah upaya untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menghasilkan hasil yang diharapkan atau lebih dari yang diharapkan. Program Kartu Prakerja yang disusun oleh pemerintah dilaksanakan di awal pandemi dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Pekanbaru.

Dampak dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana dampak pada Masyarakat. Penelitian yang mengungkap dampak positif program Kartu Prakerja

terhadap peningkatan keterampilan dan peluang kerja peserta dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Efisiensi dalam penelitian ini adalah Program Kartu Prakerja dapat diukur dari berbagai faktor, termasuk pengelolaan dana yang di berikan kepada masyarakat, pemanfaatan waktu yang optimal dalam pelaksanaan program, penyediaan materi pelatihan yang relevan dan berkualitas, serta penggunaan teknologi untuk memper-cepat proses administrasi dan pelaporan. Dengan mencapai efisiensi yang baik da-lam semua aspek tersebut, program Kartu Prakerja dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta sambil menjaga biaya pelaksanaan program tetap efektif.

Keberlanjutan dalam penelitian ini merujuk melakukan meningkatkan kualitas materi pelatihan, metode pengajaran, dan dukungan yang diberikan kepada peserta agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah dan perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan agar tetap relevan dengan perkembangan tren pasar kerja dan kebutuhan keterampilan yang diperlukan oleh peserta. Terakhir, Replikabilitas dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan program untuk direplikasi atau diadopsi kembali dalam konteks yang berbeda atau di lokasi yang berbeda dengan hasil yang serupa atau mendekati. Replikabilitas program Kartu Prakerja dapat ditingkatkan, sehingga konsep, strategi, dan praktik yang efek-tif dalam program ini dapat diterapkan dan diadopsi secara lebih luas untuk mem-berikan manfaat yang signifikan bagi peserta dan masyarakat secara keseluruhan. Program Kartu Prakerja Program harus terbuka untuk kolaborasi dengan pihak lain, seperti lembaga pelatihan, industri, atau pemerintah daerah, sehingga pembelajaran bersama dan pertukaran pengalaman dapat meningkatkan replikabilitas program.

Relevansi

Indikator yang pertama dalam pengukuran Evaluasi Menurut Reidar Dale ada-lah Relevansi. Relevansi merujuk pada sejauh mana Program Kartu Prakerja sesuai dengan kebutuhan dan tujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas serta mengembangkan kewirausahaan. Beriku-wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selaku stakeholder. Adapun urgensi yang mendorong pemerintah untuk melaksanakan program Kartu Prakerja karena dilatar belakang oleh masalah ketenagakerjaan di Indonesia yaitu: pertama, menurut data BPS, jumlah angkatan kerja hingga Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang, naik 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Namun, karakteristik penduduk yang bekerja menurut tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat pendidikan yang rendah yaitu pendidikan SD ke bawah sebesar 52,40 juta (40,51 persen) lalu diikuti oleh tingkat pendidikan lainnya. Apabila kondisi ini tidak dapat segera ditangani oleh pemerintah maka Indonesia akan didominasi oleh tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Rendahnya pendidikan akan berdampak pada kualitas SDM itu sendiri di mana kualitas yang rendah akan sejalan dengan ketidak mampuan SDM dalam persaingan global.

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kondisi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas organisasi menunjukkan seberapa baik sebuah organisasi dalam mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan. Di sisi lain, efektivitas merujuk pada berbagai cara atau upaya yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana program tersebut berhasil dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Kartu Prakerja dibuat oleh pemerintah dan tertuang pada Peraturan Presiden No 113 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui

Program Kartu Prakerja. PERPRES ini menjelaskan adanya persyaratan untuk menerima Program Kartu Prakerja diantaranya WNI berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun, Tidak sedang menempuh pendidikan formal, Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil, Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD dan Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Aris Budyanto, S.Si selaku Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau selaku stakeholder pemerintah daerah untuk kriteria atau persyaratan Program Kartu Prakerja. Dalam hal ini, untuk mengevaluasi Efektivitas Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu memberikan jawaban yang cukup. Wawancara ini difokuskan pada aspek Efektivitas Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru belum tepat sasaran karena masih banyaknya penerima Program Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Peraturan Presiden No 113 Tahun 2022. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan lainnya dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa yang menerima Program Kartu Prakerja dengan menayakan hal yang sama mengenai ketepatan sasaran Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara dengan Catur Indra selaku penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru belum tepat sasaran nya sesuai. Pasalnya masyarakat yang sedang menempuh pendidikan Formal lulus di Program Kartu Prakerja, pemerintah harus melakukan proses penyeleksian dengan secara efektif agar nantinya penerima Program Kartu Prakerja ini tidak salah sasaran.

Sosialisasi program ialah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau pemerintah untuk memperkenalkan dan menjelaskan program tertentu kepada masyarakat luas atau kelompok sasaran. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa informasi mengenai program tersebut tersampaikan dengan baik, sehingga masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan cara berpartisipasi dalam program tersebut. Penulis juga melakukan wawancara mengenai sosialisasi Program Kartu Prakerja dengan penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara dengan Riza Umami selaku penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwasannya pihak Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan Sosialisasi mengenai Program Kartu Prakerja. Untuk memperkuat hasil wawancara terkait tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada masyarakat yang bukan penerima Program Kartu Prakerja. Dari hasil wawancara tersebut Masyarakat yang bukan penerima Program Kartu Prakerja tidak pernah mendengar Program Kartu Prakerja ini sama sekali. Berikut menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih kurang gencar dan belum mencapai tingkat intensitas yang diperlukan dan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami program tersebut, termasuk tujuan, manfaat, dan cara untuk mendaftar serta memenuhi kriteria sebagai penerima Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja di kota Pekanbaru adalah belum efektif. Hal ini dikarenakan beberapa alasan Ketidaktepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi merupakan

dua masalah utama yang dapat menghambat Program Kartu Prakerja. Ketidak tepatan sasaran terjadi ketika bantuan yang diberikan oleh program ini tidak mencapai orang-orang yang benar-benar membutuhkannya, seperti pencari kerja, buruh yang terkena PHK. Akibatnya, mereka yang seharusnya menerima manfaat dari program ini justru tidak mendapatkannya, sementara orang-orang yang tidak memenuhi kriteria malah menerima bantuan tersebut, kemudian kurangnya so-sialisasi menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai ten-tang Program Kartu Prakerja. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program ini, tujuan dan manfaatnya, serta cara mendaftar dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Dampak

Dampak adalah akibat yang muncul dari suatu kegiatan, baik yang telah di-rencanakan maupun yang tidak direncanakan. Dampak merupakan sesuatu yang tid-ak terhindarkan dan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Kemudian dampak sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan/ program yang dilakukan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat Program Kartu Prakerja mem-berikan insentif keuangan kepada peserta yang menyelesaikan pelatihan, tetapi untuk dampak pelatihan Program Kartu Prakerja ini juga perlu dipertimbangkan apakah yang menerima Program Kartu Prakerja ini serius dalam mengikuti pelatihannya se-hingga penerima mendapatkan ilmu untuk mencari kerja atau hanya ingin menginginkan uang dari Program Kartu Prakerja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan sebagai penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dengan menanyakan mereka hal yang sama mengenai dampak Program Kartu Prakerja. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Catur Indra selaku pen-erima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru bahwasannya hanya uang insentif yang berdampak kepada dirinya dan pelatihan yang ada di Program Kartu Prakerja sama sekali tidak berdampak kepada dirinya. Selain itu adapun pendapat yang sama di sampaikan oleh seorang pen-cari ker-ja yang menerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara di atas, penerima Program Kartu Prakerja tidak merasakan manfaat dari pelatihan yang disediakan dalam program tersebut. Namun, uang insentif yang mereka terima memberikan dampak positif dalam membantu mereka mencari pekerjaan dan kebutuhan lainnya. Berdasarkan data yang di dapat penerima Program Kartu Prakerja hanya merasakan dampak dari segi insentif yang cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dari segi pelatihan, peserta penerima Program Kartu Prakerja tidak merasa mendapatkan peningkatan keterampilan karena pelatihan dilakukan secara Online. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Dampak dalam Evaluasi Program Prakerja di Kota Pekanbaru kurang baik. Hal ini dikarenakan penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru tidak serius dalam mengikuti pelatihan yang telah diberikan sehingga penerima manfaat tidak mendapatkan ilmu nya sama sekali. Dapat dilihat penerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru hanya mengejar insentif nya saja tetapi tidak dengan ilmunya.

Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang

besar atau cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga dan biaya. Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keuntungan (output) sesuai dengan rencana atau harapan. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengatakan bahwasannya Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru masih terdapat kendalanya. Pelatihan yang dilakukan secara online seringkali memiliki kekurangan interaksi langsung antara peserta dan mentor. Ini dapat mengurangi efektivitas pelatihan karena peserta tidak bisa mendapatkan penjelasan mendalam atau umpan balik langsung. Belajar secara mandiri atau melalui platform online membutuhkan motivasi dan disiplin yang tinggi. Banyak peserta mungkin kesulitan untuk tetap fokus dan menyelesaikan pelatihan tanpa dorongan dan pengawasan yang lebih personal.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai hal yang sama tentang Efisiensi Program Kartu Prakerja kepada seorang yang menerima Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari wawancara di atas penerima Program Kartu Prakerja mengalami down-time atau lambat diakses, sehingga peserta kesulitan untuk masuk dan memilih pelatihan yang akan diterima. Penerima Program Kartu Prakerja juga mungkin kesulitan mendapatkan bantuan atau dukungan jika mengalami masalah selama proses pembelian. Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Efisiensi dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru adalah belum efisien. Hal ini dikarenakan Ketidakefisienan sistem dalam Program Kartu Prakerja yang mengacu pada berbagai masalah yang menghambat pelaksanaan program secara optimal. Ini mencakup sejumlah aspek teknis, administratif, dan operasional yang menyebabkan proses menjadi lambat, sulit, atau kurang efektif. Beberapa contoh masalah yang menyebabkan seringnya terjadi gangguan teknis pada platform digital, proses verifikasi identitas yang bermasalah, prosedur administrasi yang rumit, serta kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Hasilnya, peserta program kesulitan mengakses pelatihan yang sesuai, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, dan memanfaatkan sepenuhnya manfaat yang ditawarkan oleh program ini.

Keberlanjutan

Keberlanjutan ialah program yang merujuk pada kemampuan sebuah program untuk terus berjalan dan mencapai tujuan jangka panjangnya dengan efisien dan efektif, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Hal ini mencakup aspek finansial, organisasi, adaptabilitas, dukungan komunitas, serta pemantauan dan evaluasi yang konsisten, sehingga program dapat mempertahankan operasional dan dampaknya dalam jangka waktu yang lama. Program harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau kebutuhan target masyarakat. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara tersebut menurut pandangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau bahwasanya pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang untuk melanjutkan atau mengakhiri Program Kartu Prakerja. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki wewenang langsung dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja, mereka tetap dapat berperan sebagai fasilitator dengan memberikan sosialisasi dan dukungan kepada warganya untuk mendaftar dan mengikuti program ini. Melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap Program Kartu Prakerja sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja dan ekonomi yang dinamis. Evaluasi ini juga

dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi yang konkret untuk peningkatan program di masa depan. Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada seorang yang merupakan penerima Program Kartu Prakerja tentang keberlanjutan Program Kartu Prakerja. Dari wawancara hasil wawancara tersebut mengatakan bahwasannya Program Kartu Prakerja tidak dapat dilanjutkan karena banyak masyarakat yang mengikuti program ini menunjukkan kecenderungan hanya tertarik pada insentif finansial yang ditawarkan. Hal ini mengakibatkan tujuan utama dari program ini, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja, tidak tercapai secara efektif. Alih-alih memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat, banyak peserta hanya berfokus pada penerimaan insentif tanpa berkomitmen penuh terhadap proses pelatihan. Akibatnya, program ini tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama mengenai keberlanjutan Program Kartu Prakerja ini kepada seorang masyarakat yang bukan penerima Program Kartu Prakerja. Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwasannya jika program bantuan menawarkan uang tunai sebagai bagian dari insentifnya, kemungkinan besar akan menarik partisipasi yang sangat tinggi dari masyarakat. Banyak orang akan terdorong untuk ikut serta dalam program tersebut karena insentif finansial langsung yang diberikan, meskipun tujuan utama dari program bantuan tersebut mungkin adalah untuk memberikan dukungan atau pelatihan di bidang tertentu. Akibatnya, fokus utama program bisa jadi teralihkan karena tingginya minat terhadap aspek keuangan daripada manfaat jangka panjang yang diharapkan dari program tersebut. Berdasarkan Analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Keberlanjutan dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru adalah belum bisa dilanjutkan. Hal ini dikarenakan Banyak peserta program lebih tertarik pada insentif finansial yang ditawarkan daripada pelatihan itu sendiri. Hal ini menyebabkan mereka mengikuti program hanya untuk mendapatkan uang tunai tanpa benar-benar memanfaatkan pelatihan yang disediakan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Tujuan utama dari Program Kartu Prakerja adalah untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja Indonesia. Namun, karena fokus banyak peserta lebih pada insentif finansial, peningkatan keterampilan dan kompetensi yang diharapkan tidak tercapai dengan baik.

Replikabilitas

Replikabilitas ialah mengacu pada kemampuan suatu program atau inisiatif untuk diulang atau diterapkan kembali dalam berbagai konteks yang berbeda, dengan tetap menghasilkan hasil yang konsisten dan serupa. Konsep ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial, karena menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya berhasil dalam satu situasi atau kondisi tertentu, tetapi juga dapat memberikan hasil yang sama efektifnya ketika diterapkan di tempat lain, sehingga dapat dijadikan model untuk penerapan yang lebih luas. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berdasarkan wawancara tersebut ialah ketergantungan yang tinggi pada insentif finansial. Banyak peserta yang mengikuti program ini lebih tertarik pada insentif uang tunai daripada pelatihan itu sendiri. Akibatnya, ketika program ini diterapkan di berbagai daerah, fokus utama sering kali bergeser dari peningkatan keterampilan ke penerimaan insentif. Ini membuat hasil yang diperoleh tidak konsisten dan kurang efektif dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya peneliti juga bertanya kepada seorang yang merupakan penerima Program Kartu Prakerja mengenai Replikabilitas Program Kartu Prakerja. Berdasarkan Wawancara tersebut Program Kartu Prakerja tidak bisa direplikasi secara efektif di berbagai daerah karena adanya

masalah akses internet yang tidak merata di seluruh Indonesia. Di daerah terpencil dan pedesaan, di mana koneksi internet seringkali lambat, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini menyebabkan peserta di daerah-daerah tersebut mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengakses dan menyelesaikan pelatihan online yang menjadi inti dari Program Kartu Prakerja.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Replikabilitas dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru adalah belum bisa direplikasi. Hal ini dikarenakan ketergantungan pada insentif juga menciptakan masalah dalam hal motivasi dan komitmen peserta. Tanpa adanya insentif yang signifikan, banyak peserta yang tidak tertarik atau bahkan meninggalkan program di tengah jalan. Hal ini menunjukkan bahwa minat mereka pada pelatihan itu sendiri sangat rendah, dan keberlanjutan program bergantung pada ketersediaan insentif finansial. Ini menjadi tantangan besar dalam mereplikasi program di berbagai daerah dengan sumber daya yang terbatas atau ketika insentif tidak dapat diberikan dalam jumlah yang sama. Ketidakteraturan akses internet ini juga menciptakan ketimpangan dalam manfaat yang diperoleh peserta dari berbagai daerah. Peserta di daerah dengan akses internet yang baik dapat menyelesaikan pelatihan dan menerima insentif sesuai yang dijadwalkan, sementara peserta di daerah dengan akses internet yang buruk seringkali tertinggal atau bahkan putus asa untuk menyelesaikan pelatihan. Ini menyebabkan tujuan utama program, yaitu meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja secara merata di seluruh Indonesia, tidak tercapai dengan baik.

Kendala Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan setiap program, Kendala-kendala pasti akan muncul selama proses pelaksanaannya. Hal ini juga berlaku untuk program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan program Kartu Prakerja oleh pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan penting dalam membantu pemerintah pusat menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Adapun Faktor kendala dalam Evaluasi Program Kartu Prakerja ialah sebagai berikut. Proses Penyeleksian yang dilakukan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya Optimal. Program Kartu Prakerja dirancang oleh pemerintah pusat. Seluruh sistem yang terkait dengan program Kartu Prakerja, mulai dari pendaftaran, penyaringan, hingga seleksi data dan pengumuman kelulusan, diatur oleh pemerintah pusat. Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Aris Budyanto, S.Si selaku Kepala Bidang Pemagangan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, hambatan dalam pelaksanaan program ini terletak pada pengelolaan sistem oleh pemerintah pusat yang kurang maksimal. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas program Kartu Prakerja, dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan ini menjadi faktor kendala utama. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Kurangnya maksimal pengelolaan sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kendala utama dalam program Kartu Prakerja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan lain dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penerima program kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dengan menanyakan hal yang sama mengenai penyeleksian yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah pusat harus memperbaiki sistem penyeleksiannya agar tidak ada lagi yang salah sasaran. Pengelolaan sistem yang baik adalah faktor utama dalam melaksanakan setiap program, termasuk program Kartu Prakerja yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Pengelolaan yang baik mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran peserta, penyaringan, seleksi, hingga evaluasi akhir. Setiap tahap memerlukan sistem yang terstruktur dan efisien agar program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif.

Pengelolaan sistem yang tidak maksimal berdampak langsung pada berbagai aspek pelaksanaan program. Misalnya, dalam tahap pendaftaran, jika sistem tidak dirancang dengan baik, banyak calon peserta yang mungkin kesulitan untuk mendaftar atau menghadapi berbagai masalah teknis yang tidak terduga. Selain itu, dalam tahap seleksi, pengelolaan sistem yang kurang baik dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih peserta yang memenuhi kriteria, sehingga program tidak tepat sasaran. Peserta yang benar-benar membutuhkan bantuan mungkin tidak terjangkau, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat malah lolos seleksi.

Kendala Teknologi dalam melakukan pelatihan Online

Masalah lainnya adalah efisiensi dari platform digital yang digunakan dalam program Kartu Prakerja. Platform yang tidak intuitif atau sulit digunakan dapat menyebabkan frustrasi dan kebingungan di kalangan peserta. Misalnya, platform kurang responsif dapat membuat peserta kesulitan untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan atau mengisi formulir dengan benar. Selain itu, jika platform sering mengalami gangguan teknis atau crash, hal ini dapat mengganggu proses belajar dalam pelatihan yang diikuti oleh peserta. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Platform pelatihan Program Kartu Prakerja sering mengalami berbagai jenis error yang sangat mengganggu proses belajar dan pelaksanaan program secara keseluruhan. Salah satu error yang paling umum terjadi adalah ketidakmampuan halaman untuk dibuka. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan lain dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penerima program kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dengan menanyakan hal yang sama mengenai kendala apa yang terjadi dalam proses pelatihan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Platform pelatihan Program Kartu Prakerja sering mengalami berbagai jenis error yang sangat mengganggu proses pelaksanaan pelatihan program secara keseluruhan. Salah satu error yang paling umum terjadi adalah ketidakmampuan halaman untuk dibuka. Hal ini menyebabkan peserta harus menunggu lama hanya untuk dapat memulai sesi pelatihan mereka, yang secara signifikan mengurangi efisiensi waktu belajar. Video yang tidak bisa diputar ini menjadi masalah besar karena banyak materi pelatihan yang disampaikan melalui media video, sehingga peserta kehilangan akses terhadap konten penting yang dibutuhkan untuk memahami materi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Program Kartu Prakerja merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat yang di realisasikan pada tahun 2020. Program ini dilaksanakan di seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk di Kota Pekanbaru. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala. Kendala yang dihadapi dalam mensukseskan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru yaitu terdapat usia yang tidak relevan untuk mengikuti Program Kartu Prakerja ini dan terdapat pelatihan yang tidak relevan untuk kebutuhan pasar kerja Indonesia, adanya ketidaktepatan sasaran program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru yang belum sesuai dengan tujuan atau sasaran yang tercantum pada Peraturan Presiden No 113 Tahun 2022, kemudian adanya kendala dikarenakan banyak penerima Program Kartu Prakerja hanya menginginkan uang insentifnya saja, masyarakat penerima Program kartu prakerja di kota Pekanbaru mengalami kendala seperti kendala pendaftaran dan kendala pembelian pelatihan, masalah masalah yang di alami Program Kartu Prakerja ini mengakibatkan Program ini tidak dapat direplikasi. Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor kendala yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Kota Pekanbaru yaitu ada 2 faktor yang pertama proses penyeleksian yang dilakukan oleh pemerintah pusat belum optimal sehingga mengakibatkan

Program Kartu Prakerja tidak tepat sasaran dan yang kedua kendala teknologi dalam melakukan pelatihan online seperti kendala jaringan yang di alami penerima Program Kartu Prakerja dan mengalami kendala seperti terjadi nya eror dalam proses pelatihan di dalam Program Kartu Prakerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan diIndonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alamsyah. (2016). Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Ananda, R. (2017). Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Perdana Publishing.
- Ananda, Rusydi dan M. hu. Tien Rafida. (2017). Pengantar Evaluasi Program pendidikan. Medan: Perdana Publishing
- Arikunto, P. (2018). Dasar Dasar Evaluasi Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
- As'ari H, Z. M. (2017). Evaluasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam upaya penguatan Ekonomi Masyarakat. Kebijakan Publik, 109-123.
- Bintoro Tjokroamidjojo (1984). Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta,
- Dale, R. (2004). Evaluating Development Programmes And Projects. London: Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi). Malang: Intrans Publishing.
- Herdiamy, E. N. (2023). Pengaruh Program Kartu Prakerja Pasca Pandemi Covid 19 terhadap Pendapatan dan Manfaat Jangka Panjang Bagi Rumah Tangga di Kota Payakumbuh.
- Hiplunudin, A. (2017). Kebijakan, birokrasi, dan pelayanan publik : tinjauan kritis ilmu administrasi negara. Yogyakarta: Calpulis.
- Inu Kencana, S. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Isaac, M. a. (1984). Handbook in research and evaluation. California.
- Maulina, P. (2020). Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Banda Aceh.
- Mulyatiningsih, E. (2011). Evaluasi Proses Suatu Program. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. (2007). Public Policy. Surabaya : PMN
- Ningrum, H. S. (2022). Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kota Semarang.
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019): 81-95.
- Septiyadi, M. R. (2021). Program Kartu Prakerja sebagai Program pemberdayaan di bidang Ketenagakerjaan di Tengah Pandemi.
- Situmorang, C. (2016). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Depok: Social Security Development Institute.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. (2008). Implementasi Kebijakan Publik "Konsep Teori dan Praktik". Riau: Alfabeta
- Supriyanto, S. &. (2007). Perencanaan dan Evaluasi. Surabaya: Airlangga University Press.
- Winarno. (2008). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Buku Kita.
- Zuraidah. (2022). Efektivitas Program kartu Prakerja di Masa Pandemi (studi Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kota Surabaya